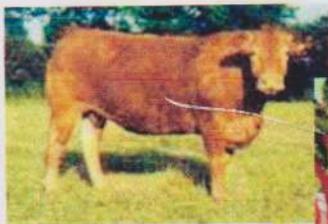




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**

Alamat : Jl. Pertanian Sukomananti Telp. : 0753 - 65547, 7004127 Kode Pos : 26366

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.46 / 119 / DTPHP/8/2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka menengah daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat program dan kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
 18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Nomor 110 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 521/01/DTPHP/2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura

dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

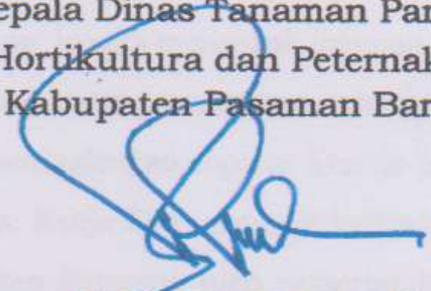
MEMUTUSKAN :

Menetapkan / :

- PERTAMA** : Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamenanti
pada tanggal 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Pasaman Barat



SLUKARLI, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19721024 200003 1 002

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2021. Sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Selanjutnya, Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
20. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Nomor 110 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Nomor No. 521/01/DTPHP/I/2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sarana dan Prasarana Pertanian, Penyuluh Pertanian, maupun Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 : *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

- 1.2 : *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 : *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 : *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019

- 2.1 : *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 : *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 : *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 : *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 : *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 : *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 : *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
- 3.3 : *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 8 (Delapan) program yang terdiri dari 23 (Dua puluh tiga) kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan tahun 2019 memuat pencapaian target kinerja tahun 2019 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2018. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan tahun 2019 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2020), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 Kabupaten Pasaman Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian kinerja RPJMD pada tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra OPD s/d Tahun 2020						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian					
1	2	3	6	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11					
3	03	01	19	1.	Program peningkatan produksi pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Pertanian (ton):									
						Padi	140.526	159.694	136.636	138.012	101,01	136.682	136.636	97%	
						Jagung	250.924	341.183	246.189	315.797	128,27	248.556	246.189	98%	
						Kedelai	28	53	26	5	18,35	27	26	93%	
						Cabai	2.056	3.123,00	2.006	4.614,00	230,01	2.031	2.006	98%	
						Apukat	1.700	388,00	800	818,00	102,25	1.200	800	47%	
						Jeruk	5.631	9.438,00	5.431	11.248,00	207,11	5.531	5.431	96%	
					1	Keg. Operasional tanaman hortikultura	Persentase realisasi kegiatan hortikultura APBN (%)	95	95	92	99	107,6	95	92	97%
							Jumlah sarana produksi yang difasilitasi (Ha)	123	20	20	20	100,0	25	65	53%
					2	Keg. Operasional Tanaman Pangan	Persentase realisasi kegiatan tanaman pangan APBN (%)	95	99	94	99	105,3	95	94	99%
							Jumlah sarana produksi yang difasilitasi (Ha)	70.157	8.947	9.310	7.600	81,6	11.900	28.447	41%
					3	Keg. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam keadaan baik (%)	70	70	65	70	107,69	65	65	93%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian kinerja RPJMD pada tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra OPD s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian
1	2	3	6	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Cetak Sawah (Ha)	317	95	-	-	#DIV/0!	50	145	46%
		Dam Parit / Embung (Unit)	80	10	14	15	107,14	4	29	36%
		Jalan Usaha Tani (Km)	21	8	6	12	200,00	2	22	105%
		Pengembangan / Rehab Irigasi Tersier (Ha)	6.660	150	450	450	100,00	500	1.100	17%
	4 Keg. Operasional sarana dan prasarana pertanian	Persentase realisasi kegiatan sarana dan prasarana pertanian APBN (%)	95	92	95	97	102,11	95	95	100%
	5 Keg. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)	211	56	22	16	72,73	22	94	45%
	6 Keg. Statistik Pertanian / Peternakan	Penyusunan data statistik dan data base pertanian / peternakan (dokumen)	12	2	2	2	100,00	2	6	50%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian kinerja RPJMD pada tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra OPD s/d Tahun 2020					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian				
1	2	3	6	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11				
3	03	01	22	3.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan Produksi ternak (ekor) :								
					Sapi	19.878	18.980	19.014	19.105	100,48	19.446	19.014	96%	
					Kambing	15.965	13.635	15.271	15.362	100,60	15.618	15.271	96%	
					Unggas	414.420	412.162	396.402	460.762	116,24	405.411	396.402	96%	
				7	Keg. Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan (Kawasan)	3	3	3	3	100,00	3	3	100%
3	03	01	21	4.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase PHMS yang ditangani (%)	85	70	75	80	106,67	80	75	88%
				8	Keg. Pencegahan, Pengendalian dan pemberantasan penyakit Zoonosis dan penyakit hewan menular	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit rabies pada ternak serta pemusnahannya (dosis)	vaksin : 15.000 dosis, HE 1.850 ekor	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	100,00	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	vaksin : 9000 dosis, HE 1100 ekor	60%
				9	Keg. Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (UPT Puskesmas)	Terpenuhinya operasional UPT Puskesmas (Puskesmas)	5	5	5	5	100,00	5	5	100%
3	03	01	17	5.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Jumlah kerjasama Pemasaran hasil Pertanian/perkebunan (MoU)	4	1	1	1	100,00	1	1	100%
				10	Keg. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah kategori promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah yang diikuti (kategori)	35	5	5	5	100,00	5	15	43%
				11	Keg. Pengadaan Lahan (Lokasi) Rumah Potong Hewan (RPH)	Terlaksananya Pengadaan Lahan RPH (Lokasi)	1	1	1	1	100,00	1	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian kinerja RPJMD pada tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra OPD s/d Tahun 2020						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian					
1	2	3	6	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11					
	12	Keg. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Jumlah promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah yang dilaksanakan (kali)	25	5	5	5	100,00	5	15	60%				
	13	Keg. Mengikuti Pekan Nasional (Penas) Tani	Jumlah Penas Tani tingkat nasional (Kali)	2	-	-	-	-	1	2	100%				
3	03	01	15	6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Jumlah kelembagaan tani yang naik kelas (kelompok)	45	-	15	15	100,00	15	15	33%	
					14	Penguatan Kelembagaan Tani	cakupan kelompok tani binaan (%)	90	75	80	80	100,00	80	80	89%
					15	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Partisipasi melalui IPDMIP	Persentase peningkatan SDM untuk pelayanan penyuluhan, petani, yang berada di daerah irigasi (%)	80	50	50	50	100,00	50	50	63%
3	03	01	20	7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh yang terlatih (orang)	23	4	5	5	100,00	4	14	61%	
					16	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan	1. jumlah penyuluh yang mengikuti diklatsar	24,0	20,0	1,0	-	-	3,0	23,0	96%
				2. Jumlah penyuluh mengikuti diklat fungsional			28,0	5,0	-	1,0	#DIV/0!	13,0	19,0	68%	
				3. Jumlah penyuluh mengikuti diklat teknis			223,0	53,0	50,0	55,0	110,00	45,0	153,0	69%	
					17	Penyusunan program penyuluhan penyuluh pertanian perikanan dan Kehutanan	Jumlah program yang disusun (dokumen)	12	12	12	12	100,00	12	12	100%
					18	Melaksanakan supervisi penyuluh pertanian perikanan dan Kehutanan	Jumlah penyuluh yang dinilai kinerjanya (orang)	44	44	44	44	100,00	44	44	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian kinerja RPJMD pada tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi capaian target renstra OPD s/d Tahun 2020					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian				
1	2	3	6	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11				
	19 Dana operasional UPT-Balai Penyuluhan (UPT-BP)	Terpenuhinya sarana dan prasarana UPT-BP (UPT-BP)	11	11	11	11	100,00	11	11	100%				
	20 Fasilitas penilaian penyuluh, petani/gapoktan berprsetasi	Jumlah penyuluh, petani/gapoktan berprestasi (peringkat)	45	9	9	9	100,00	9	36	80%				
	21 Pelaksanaan training penyuluh pertanian perikanan dan Kehutanan	Jumlah training penyuluh yang dilaksanakan (kecamatan)	11	11	11	11	100,00	11	11	100%				
3	03	01	01	8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100	100%			
				22	Keg. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100	100%			
				23	Keg. Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Perkantoran Dan Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara (unit)	140	120	136	136	100,00	140	136,0	97%
				24	Keg. Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang diikuti (%)	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100%
3	03	01	02	10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100%
				25	Keg. Pengadaan / Pembangunan Gedung Kantor Dan Rumah Jabatan / Dinas	Jumlah sarana Prasarana yang dibangun (paket)	2	-	-	-	-	-	-	0%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 5 (lima) target program tercapai 100% dan 3 (tiga) target program lainnya pencapaiannya di atas 100%. Program-program yang targetnya tercapai 100% adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Tani. Sementara itu, program-program yang pencapaian target kinerjanya diatas 100% adalah program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program peningkatan produksi hasil peternakan, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.

Target kinerja sebanyak 28 indikator kegiatan adalah sebagai berikut:

- Terlaksana dengan “sangat baik” atau sebesar 99% - 100 % sebanyak 21 indikator kinerja.
- Terlaksana dengan “baik” atau 80% - 95 % sebanyak 4 indikator kinerja.

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa kegiatan yang dananya merupakan dana pendampingan dari kegiatan Tugas Pembantuan sehingga kemungkinan ada kegiatan yang tidak muncul.
2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga disebabkan terjadinya kesalahan dalam penganggaran sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.
3. Benih padi sering terlambat droping dan kurangnya pengawasan benih jagung yang kadaluarsa

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Meningkatkan pengawasan kelapangan bersama BPSB dalam pemeriksaan benih
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD.

5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutuhkan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor pertanian. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang pertanian telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan													
Kabupaten Pasaman Barat													
No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Restra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				1	2	3	4	1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama												
	Padi			131.306	133.150	134.994	136.838	121.217	136.378	159.942	138.012	138.682	
	Jagung			239.088	241.455	243.822	246.189	201.540	340.781	367.865	315.797	248.556	
	Kedelai			23	24	25	26	23	14	41	5	27	
2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan												
	Cabai			1.958	1.966	1.981	2.006	1.475	2.161	3.123	4.614	2.031	
3	Jumlah Produksi Buah-buahan Unggulan												
	Jeruk			5.131	5.231	5.331	5.431	5.297	8.596	9.464	11.248	5.531	
	Alpukat			250	300	500	800	249	384	391	818	1.200	
4	Jumlah Populasi Ternak Unggulan												
	Sapi			17.718	18.150	18.582	19.014	17.587	18.277	18.980	19.105	19.446	
	Kambing			14.230	14.577	14.924	15.271	12.708	13.409	13.635	15.362	15.618	
	Unggas			369.375	378.384	387.393	396.402	387.730	429.175	430.862	460.762	405.411	

Pada umumnya capaian kinerja OPD sudah cukup bagus dimana target rata-rata tercapai setiap tahunnya. Hal ini karena adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 2) Masih rendahnya kesejahteraan petani di sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- 3) Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian.
- 4) Masih rendahnya daya saing beberapa produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 5) Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 6) Masih terbatasnya akses petani ke permodalan dan teknologi.
- 7) Masih kurangnya kualitas SDM petani.
- 8) Masih belum optimalnya dan semakin berkurangnya SDM Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.
- 9) Sempitnya kepemilikan lahan, sehingga usahatani tidak efisien.
- 10) Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat pada komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
- 11) Masih mahalnya teknologi mekanisasi.
- 12) Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- 13) Semakin terbatasnya sumberdaya manusia petani pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, dan generasi muda kurang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian.
- 14) Masih kurangnya tenaga teknis menengah bidang pertanian.
- 15) Masih rendahnya sistem jaminan mutu keamanan pangan (SJMKP) produksi dan produktivitas yang dihasilkan sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing.

Keterbatasan SDM serta mekanisme perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.
- c. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.
- d. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.
- e. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan hortikultura dan peternakan.
- f. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
- g. Kurangnya jumlah SDM Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.
- h. Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk petani.
- i. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.
- j. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian semakin mengkhawatirkan.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2020, bahwa APBD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 19.191.642.629,- yang terdiri dari

- 1) Belanja Tidak Langsung Rp. 8.744.053.929,-
- 2) Belanja Langsung Rp. 10.447.588.700,-

Artinya, struktur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan APBD Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 akan didominasi oleh Belanja Publik. Sementara itu, jumlah Plafon Belanja Langsung tahun 2020 pagu sementara yang dialokasikan untuk Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan adalah sebesar Rp. 19.191.642.629,-

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	
					13.923.315.650				13.923.315.650	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)		100%	928.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	928.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Distanhomak	100%	503.000.000	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	503.000.000	
	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	Persentase terpeliharanya peralatan kerja aparatur (%)	Distanhomak	100%	250.000.000	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan	Persentase terpeliharanya peralatan kerja aparatur (%)	100%	250.000.000	
	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang diikuti (%)	Dalam dan luar daerah	100%	175.000.000	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang diikuti (%)	100%	175.000.000	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)		100%	2.530.000.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	2.530.000.000	
	Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas	Jumlah sarana Prasarana yang dibangun (paket)	Distanhomak	100%	2.500.000.000	Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas	Jumlah sarana Prasarana yang dibangun (paket)	100%	2.500.000.000	
	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	Jumlah pengadaan peralatan kendaraan dan mesin (unit)	Distanhomak	100%	30.000.000	Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin	Jumlah pengadaan peralatan kendaraan dan mesin (unit)	100%	30.000.000	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			120.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		120.000.000	
	Pengadaan Pakaian Aparatur	Pengadaan pakaian dinas aparatur	Distanhomak	3 macam	120.000.000	Pengadaan Pakaian Aparatur	Pengadaan pakaian dinas aparatur	3 macam	120.000.000	

5	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Jumlah kerjasama Pemasaran hasil Pertanian/perkebunan (MoU)		1 MoU	343.000.000	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Jumlah kerjasama Pemasaran hasil Pertanian/perkebunan (MoU)	1 MoU	343.000.000	
	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah yang dilaksanakan (kali)	Dalam dan luar daerah	5 kali	53.000.000	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah yang dilaksanakan (kali)	5 kali	53.000.000	
	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah kategori promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah yang diikuti (kategori)	Luar daerah	5 Kategori	90.000.000	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah kategori promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah yang diikuti (kategori)	5 Kategori	90.000.000	
	Operasional dan pengembangan pasar ternak	Jumlah Sarana Prasarana pasar ternak yang dipelihara (paket)	Sp III Ophir	1 paket	200.000.000	Operasional dan pengembangan pasar ternak	Jumlah Sarana Prasarana pasar ternak yang dipelihara (paket)	1 paket	200.000.000	
6	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Pertanian (ton):		Padi=140.526, Jagung= 250.924, Kedelai= 28	2.450.000.000	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Pertanian (ton):	Padi=140.526, Jagung= 250.924, Kedelai= 28	2.450.000.000	
				Cabe=2.056, Jeruk= .5.631, Alpukat= 1.700				Cabe=2.056, Jeruk= .5.631, Alpukat= 1.700		
	Operasional tanaman hortikultura (Pendamping TP)	Persentase realisasi kegiatan hortikultura Dana APBN (%)	Kab. Pasaman Barat	95%	210.000.000	Operasional tanaman hortikultura (Pendamping TP)	Persentase realisasi kegiatan hortikultura Dana APBN (%)	95%	210.000.000	
		Jumlah sarana produksi yang difasilitasi (Ha)		30 Ha			Jumlah sarana produksi yang difasilitasi (Ha)	30 Ha		
	Pembangunan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan :	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam keadaan baik (%)	Kab. Pasaman Barat	65%	980.000.000	Pembangunan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan :	Persentase Pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam keadaan baik (%)	65%	980.000.000	
	Operasional Tanaman Pangan (Pendamping TP)	Persentase realisasi kegiatan tanaman pangan Dana APBN (%)	Kab. Pasaman Barat	95%	265.000.000	Operasional Tanaman Pangan (Pendamping TP)	Persentase realisasi kegiatan tanaman pangan Dana APBN (%)	95%	265.000.000	
		Jumlah sarana produksi yang difasilitasi (Ha)		12.000 Ha			Jumlah sarana produksi yang difasilitasi (Ha)	12.000 Ha		
	Operasional sarana dan prasarana pertanian (Pendamping TP)	Tersedianya SID Kegiatan Sarana dan Prasarana (paket)	Kab. Pasaman Barat	4 paket	320.000.000	Operasional sarana dan prasarana pertanian (Pendamping TP)	Tersedianya SID Kegiatan Sarana dan Prasarana (paket)	4 paket	320.000.000	
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)	Kab. Pasaman Barat	20 unit	100.000.000	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)	Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)	20 unit	100.000.000	
	Statistik pertanian/peternakan/perkebunan	Penyusunan data statistik dan data base pertanian / peternakan (dokumen)	Kab. Pasaman Barat	2 Dokumen	100.000.000	Statistik pertanian/peternakan/perkebunan	Penyusunan data statistik dan data base pertanian / peternakan (dokumen)	2 Dokumen	100.000.000	
	Perencanaan pembangunan pertanian dan peternakan	Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan peternakan (Dokumen)	Kab. Pasaman Barat	2 Dokumen	200.000.000	Perencanaan pembangunan pertanian dan peternakan	Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan peternakan (Dokumen)	2 Dokumen	200.000.000	
	Operasional Balai Benih TPH	Jumlah Varietas Lokal dilepas dan dilestarikan (Varietas)	Kab. Pasaman Barat	6 varietas	150.000.000	Operasional Balai Benih TPH	Jumlah Varietas Lokal dilepas dan dilestarikan (Varietas)	6 varietas	150.000.000	
	Operasional Perbenihan dan Bina Usaha	1. Jumlah Penangkar dan DMB Berproduksi (Penangkar)	Kab. Pasaman Barat	7 penangkar	125.000.000	Operasional Perbenihan dan Bina Usaha	1. Jumlah Penangkar dan DMB Berproduksi (Penangkar)	7 penangkar	125.000.000	
		2. Jumlah benih unggul bersertifikat (ton)		25 ton			2. Jumlah benih unggul bersertifikat (ton)	25 ton		

7	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah penyuluh yang terlatih		5 orang	1.544.000.000	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah penyuluh yang terlatih	5 orang	1.544.000.000	
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan	1. jumlah penyuluh yang mengikuti diklatsar	11 Kecamatan	3 orang	105.000.000	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan	1. jumlah penyuluh yang mengikuti diklatsar	3 orang	105.000.000	
		2. Jumlah penyuluh mengikuti diklat fungsional,		10 orang			2. Jumlah penyuluh mengikuti diklat	10 orang		
		3. Jumlah penyuluh mengikuti diklat teknis		55 orang			3. Jumlah penyuluh mengikuti diklat teknis	55 orang		
	Penyusunan program penyuluhan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah program yang disusun (dokumen)	11 Kecamatan	12 dokumen	25.000.000	Penyusunan program penyuluhan penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah program yang disusun (dokumen)	12 dokumen	25.000.000	
	Melaksanakan supervisi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah penyuluh yang dinilai kinerjanya (orang)	11 Kecamatan	48 orang	17.000.000	Melaksanakan supervisi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah penyuluh yang dinilai kinerjanya (orang)	48 orang	17.000.000	
	Dana operasional UPT Balai Penyuluhan (UPT BP)	Terpenuhinya operasional UPT-BP (UPT-BP)	11 Kecamatan	11 kecamatan	1.240.000.000	Dana operasional UPT Balai Penyuluhan (UPT BP)	Terpenuhinya operasional UPT-BP (UPT-BP)	11 kecamatan	1.240.000.000	
	Fasilitasi penilaian penyuluh, petani/gapoktan berprestasi	Jumlah ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian berprestasi (peringkat)	Kab. Pasaman Barat	9 peringkat	75.000.000	Fasilitasi penilaian penyuluh, petani/gapoktan berprestasi	Jumlah ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian berprestasi (peringkat)	9 peringkat	75.000.000	
	Pelaksanaan training penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah training penyuluh yang dilaksanakan (kali)	11 Kecamatan	220 kali	82.000.000	Pelaksanaan training penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan	Jumlah training penyuluh yang dilaksanakan (kali)	220 kali	82.000.000	
8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase PHMS yang ditangani		85%	870.000.000	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase PHMS yang ditangani	85%	870.000.000	
	Pencegahan, Pengendalian dan pemberantasan penyakit Zoonosis dan penyakit hewan menular	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit rabies pada ternak serta pemusnahannya (dosis)	11 Kecamatan	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	290.000.000	Pencegahan, Pengendalian dan pemberantasan penyakit Zoonosis dan penyakit hewan menular	Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit rabies pada ternak serta pemusnahannya (dosis)	vaksin : 2000 dosis, HE 250 ekor	290.000.000	
	Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (UPT Puskesmas)	Terpenuhinya operasional UPT Puskesmas (Puskesmas)	5 Kecamatan	5 UPT Puskesmas	480.000.000	Operasional Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (UPT Puskesmas)	Terpenuhinya operasional UPT Puskesmas (Puskesmas)	5 UPT Puskesmas	480.000.000	
	Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan dan pembinaan kesehatan hewan yang dilaksanakan (kali)	11 Kecamatan	11 kali	100.000.000	Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan dan pembinaan kesehatan hewan yang dilaksanakan (kali)	11 kali	100.000.000	

9	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi ternak (ekor):		Sapi=19.878, Kambing= 15.965, Unggas= 414.420	2.955.000.000	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi ternak (ekor):	Sapi=19.878, Kambing= 15.965, Unggas= 414.420	2.955.000.000	
	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah bibit ternak yang diserahkan kepada masyarakat (ekor)	10 Kecamatan	Kambing = 100 ekor, unggas = 300 ekor	2.890.000.000	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah bibit ternak yang diserahkan kepada masyarakat (ekor)	Kambing = 100 ekor, unggas = 300 ekor	2.890.000.000	
	Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan	Jumlah Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan (Kawasan)	3 Kecamatan (Kinali, Luhak Nan Duo, Pasaman)	3 kawasan	65.000.000	Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan	Jumlah Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan (Kawasan)	3 kawasan	65.000.000	
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Jumlah kelembagaan tani yang naik kelas (kelompok)		15 kelompok	2.153.315.650	Program Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Jumlah kelembagaan tani yang naik kelas (kelompok)	15 kelompok	2.153.315.650	
	Penguatan kelembagaan tani	cakupan kelompok tani binaan (%)	Kab. Pasaman Barat	90%	200.000.000	Penguatan kelembagaan tani	cakupan kelompok tani binaan (%)	90%	200.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Partisipasi melalui IPDMIP	Persentase peningkatan SDM untuk pelayanan penyuluhan, petani, yang berada di daerah irigasi (%)	Kab. Pasaman Barat	80%	1.953.315.650	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Partisipasi melalui IPDMIP	Persentase peningkatan SDM untuk pelayanan penyuluhan, petani, yang berada di daerah irigasi (%)	80%	1.953.315.650	
	Jumlah				13.923.315.650	Jumlah			13.923.315.650	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 13.923.315.650,- (Tiga belas milyar sembilan dua puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dan RPJMD Periode 2016-2021. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan, maka kebutuhan anggaran tidak ada perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat pada umumnya berdasarkan usulan program/kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.3.
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2021
Berdasarkan Hasil Musrenbang

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan Disetujui	Readiness Criteria/ Data Dukung	Jumlah Kegiatan Ditolak	Keterangan
1	Sungai Beremas	23	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	-	
2	Lembah Melintang	19	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	3	Kewenangan OPD lain
3	Ranah Batahan	17	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	-	
4	Luhak Nan Duo	3	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	2	Kewenangan OPD lain
5	Kinali	5	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	2	Kewenangan OPD lain
6	Talamau	81	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	19	Kewenangan OPD lain
7	Koto Balingka	2	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	1	Kewenangan OPD lain
8	Pasaman	9	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	2	Kewenangan OPD lain
9	Gunung Tuleh	3	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	2	Kewenangan OPD lain
10	Sungai Aur	2	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	9	Kewenangan OPD lain
11	Sasak Ranah Pasisie	4	Diterima jika keltan terdaftar, ada proposal, dan sesuai teknis	1	Kewenangan OPD lain

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015-2019, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yakni:

1. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
5. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Adapun sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan prioritas pembangunan Propinsi terletak pada program dan kegiatan yang diusulkan melalui aplikasi “Sakato Plan” sedangkan untuk Dana Tugas Pembantuan dapat diusulkan melalui e-Proposal dan kegiatan DAK melalui aplikasi e-Krisna. Sinkronisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Provinsi dan Kabupaten

NO	KEMENTERIAN PERTANIAN		DINAS TANAMAN PANGAN HORITKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT		DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas	Sekolah lapang pengembangan jagung	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Operasional Tanaman Pangan (Pendamping TP)
4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		Pengembangan Jeruk		Operasional tanaman hortikultura (Pendamping TP)
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Peningkatan sarana dan prasarana	Penggunaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen		Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)
		Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian				Pembangunan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan
5	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Promosi Pemasaran Hasil Pertanian	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

6	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	1812-Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas dan SDM	Pemberdayaan SDM penyuluh	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan
				Pemberdayaan kelembagaan tani	Program Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Penguatan kelembagaan tani
7	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Pengembangan Kawasan Sentra produksi Peternakan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas	Pengawasan Mutu Pakan Ternak	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pencegahan, Pengendalian dan pemberantasan penyakit Zoonosis dan penyakit hewan menular

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi		Target			
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Komoditi Sektor Pertanian (ton):							
				Padi	129.462	121.217	136.378	136.578	136.838	138.682	140.526
				Jagung	236.721	201.540	340.781	341.281	246.189	248.556	250.924
				Kedelai	132	23	14	133	26	27	28
				Cabai	1.953	1.475	2.161	2.211	2.006	2.031	2.056
				Jeruk	5.081	5.297	8.596	8.656	5.431	5.531	5.631
				Alpukat	240	249	384	434	800	1.200	1.700
		Persentase Pertumbuhan PDRB sub sektor Peternakan	2. Meningkatnya populasi ternak	Jumlah produksi ternak (ekor):							
				Sapi	17.286	17.587	18.277	18.582	19.014	19.446	19.878
				Kambing	13.883	12.708	13.409	14.924	15.271	15.618	15.965
				Unggas	360.366	387.730	429.175	387.393	396.402	405.411	414.420
			3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan nilai SAKIP	C	C	B	B	B	BB	BB
				Level Maturnitas SPP	1	1	3	3	3	3	3
				Opini terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat Tahun 2021 tertuang dalam 5 (Lima) program yang terdiri dari 16 (Enam belas) kegiatan dan 37 (Tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 14.179.717.607,- (*Dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah*), sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.01.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.01.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 THL		33,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	33,150,000
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						181,150,000			220,000,000				
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	74 unit 3 THL		68,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	70,000,000
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	74 unit		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	60,000,000
3	27	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Alat Besar yang akan dilakukan pemeliharaan		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 unit		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	40,000,000
3	27	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Mebel yang mendapat pemeliharaan		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	60 unit		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	15,000,000
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 unit		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	15,000,000
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 paket		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	20,000,000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						323,450,000			400,000,000				
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						184,450,000			230,000,000				
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah produksi ternak (ekor)	Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengawasan penggunaan sarana pertanian		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,263 ekor	12 bulan 5 THL		164,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi ternak (ekor)	450,263 ekor	200,000,000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah produksi ternak (ekor)	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,263 ekor	12 bulan 3 THL		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi ternak (ekor)	450,263 ekor	30,000,000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						139,000,000			170,000,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.01.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.01.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah produksi ternak (ekor)	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,263 ekor	3 Varietas		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produksi ternak (ekor)	450,263 ekor	120,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah produksi ternak (ekor)	Jumlah varietas yang meningkat kualitasnya		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,263 ekor	3 Varietas		39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah produksi ternak (ekor)	450,263 ekor	50,000,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						1,782,173,281				1,830,000,000		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						92,173,281				80,000,000		
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	Jumlah dokumen yang disusun		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 dokumen		16,923,281	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	80 %	0
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas prasarana pertanian		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	12 bulan 2 THL		75,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	80 %	80,000,000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						1,690,000,000				1,750,000,000		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	Jumlah dokumen perencanaan Jaringan Irigasi usaha tani		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	80 %	50,000,000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun		Kab. Pasaman Barat, Ranah Batahan, Desa Baru	80 %	2 paket		1,400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	80 %	1,400,000,000
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	Jumlah dam parit yang dibangun		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	6 unit		240,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang masih bisa digunakan (%)	80 %	300,000,000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						673,950,000				720,000,000		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						210,585,000				220,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.01.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.3.30.5.01.01.0000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase PHMS yang tertangani	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	4 THL 5.261 kejadian		210,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PHMS yang tertangani	50 %	220,000,000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			463,365,000										500,000,000
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase PHMS yang tertangani	Jumlah lokasi pelayanan kesehatan hewan Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	2 UPTD 15 THL		463,365,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PHMS yang tertangani	50 %	500,000,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			3,382,261,650										3,550,000,000
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			3,382,261,650										3,550,000,000
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh Terlatih	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas kapasitas kelembagaan penyuluh jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/bimtek		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	55 THL 101 orang		1,078,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Jumlah Penyuluh Terlatih	35 orang	1,100,000,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh Terlatih	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pengembangan kapasitas kelembagaan petani		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	100 kelompok 13 THL		150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Jumlah Penyuluh Terlatih	35 orang	200,000,000
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Terlatih	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	12 bulan 17 THL		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyuluh Terlatih	35 orang	250,000,000
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Terlatih	Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	18 kali		1,953,316,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penyuluh Terlatih	35 orang	2,000,000,000
TOTAL											14,179,717,607							15,754,719,031

BAB V PENUTUP

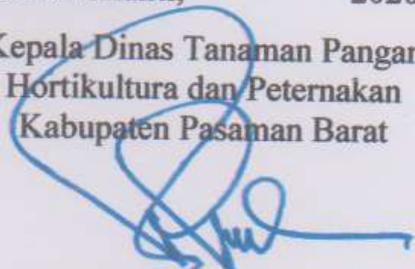
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2021. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pertanian dan Peternakan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Sukomananti, 2020

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Pasaman Barat



SUKARLI, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19721024 200003 1 002